

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **2.1 Gambaran Umum Kabupaten Gresik**

Substansi pada bab ini diawali dengan berisikan gambaran umum daerah di Kabupaten Gresik. Oleh karenanya, pada bab ini dipaparkan mengenai deskripsi dari lokasi yang menjadi objek pada penelitian. Secara spesifiknya diuraikan mengenai letak geografis dan administrasi, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan potensi pariwisata daerah di Kabupaten Gresik yang didukung oleh data-data terkait. Bab II ini diperlukan tentunya guna mengenal lebih jauh lagi lokasi serta kondisi dari objek penelitian yang telah dilakukan.

##### **2.1.1 Letak Geografis dan Administrasi**

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten dari 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.191,25 km<sup>2</sup>. Wilayahnya terletak diantara 112°-113° BT dan 7°-8° LS. Kabupaten Gresik termasuk wilayah dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 2-12 meter di atas permukaan laut, kecuali salah satu kecamatan, yaitu Panceng yang memiliki ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Namun, sebagian besar wilayahnya juga termasuk daerah pesisir pantai yang berada pada 140 km lepas pantai Pulau Jawa. Kabupaten Gresik memiliki rata-rata temperatur udara, yaitu temperatur minimum sebesar 27, 80°C dan temperatur maksimum sebesar 33, 40°C. Permukaan air tanah di Kabupaten Gresik umumnya relatif dalam namun, untuk daerah rawa-rawa memiliki permukaan air tanah yang dangkal. Selanjutnya, pola aliran sungai Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh 3 sungai, yaitu Kali Brantas, Kali Lamong, dan Sungai Bengawan Solo. Selain itu, adanya mata air, bendungan, waduk, dan pompa air juga turut mempengaruhi pola aliran sungai.

Mengacu pada Pasal 19 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun

2011-2031 yang menyebutkan bahwa kawasan perkotaan yang masuk kedalam “kategori Pusat Kegiatan Nasional adalah Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Malang”. Menurut Pasal 1 ayat 24 “Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, kegiatan nasional, atau kegiatan beberapa provinsi”<sup>39</sup>. Dengan demikian, Kabupaten Gresik termasuk salah satu kawasan yang berpotensi untuk berkembang pesat dalam kumpulan Surabaya Metropolitan Area.

Kemudian, secara administratif Kabupaten Gresik berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan, sebelah timur berbatasan langsung dengan Selat Madura dan Kota Surabaya. Wilayah Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 kecamatan dengan 303 desa dan 26 kelurahan. Berikut disajikan tabel wilayah Kabupaten Gresik beserta jumlah desa/kelurahannya:

Tabel 2. 1 Jumlah Desa/Kelurahan di Setiap Kecamatan Kabupaten Gresik

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Tambak	13	
2.	Sangkapura	17	
3.	Ujungpangkah	13	
4.	Panceng	14	
5.	Dukun	26	
6.	Sidayu	21	
7.	Bungah	22	
8.	Manyar	23	

<sup>39</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031

9.	Gresik	5	16
10.	Kebomas	11	10
11.	Duduksampeyan	23	
12.	Cerme	25	
13.	Balongpanggang	25	
14.	Benjeng	23	
15.	Menganti	22	
16.	Kedamean	15	
17.	Driyorejo	16	
18.	Wringinanom	16	

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka 2022



### 2.1.2 Kondisi Sosial

Kondisi sosial merupakan keadaan atau situasi penduduk dalam suatu wilayah yang dapat mempengaruhi berjalannya suatu kehidupan. Kependudukan menjadi bagian terpenting dari hal tersebut. Kependudukan akan mempengaruhi pertumbuhan suatu wilayah. Tentunya kependudukan berdampak pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

#### a. Jumlah penduduk

Pada tahun 2021, tercatat keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Gresik mencapai angka 1.314.895 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 660.624 dan 654.271 untuk penduduk perempuan. Berikut penjabaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin di seluruh kecamatan Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk di Setiap Kecamatan Kabupaten Gresik

Kecamatan		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Wringinanom	37.328	36.850	74.178
2.	Driyorejo	52.831	51.989	104.820
3.	Kedamean	32.821	32.163	64.984
4.	Menganti	64.490	63.392	127.882
5.	Cerme	41.260	40.774	82.034
6.	Benjeng	33.669	33.433	67.102
7.	Balongpanggung	28.975	29.191	58.166
8.	Duduksampeyan	25.327	25.421	50.748
9.	Kebomas	56.065	55.714	111.779
10.	Gresik	40.432	41.062	81.494
11.	Manyar	59.552	58.415	117.967
12.	Bungah	34.965	34.315	69.280
13.	Sidayu	22.324	21.917	44.241

14.	Dukun	33.958	33.525	67.483
15.	Panceng	26.642	26.663	53.305
16.	Ujungpangkah	26.491	26.280	52.771
17.	Sangkapura	27.800	27.390	55.190
18.	Tambak	15.694	15.777	31.471
<b>Jumlah</b>		<b>660.624</b>	<b>654.271</b>	<b>1.314.895</b>

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka 2022

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kecamatan dengan penduduk paling banyak adalah Kecamatan Menganti dengan jumlah penduduk mencapai 127.882 jiwa, yaitu 64.490 jiwa untuk penduduk laki-laki dan 63.392 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan Manyar menjadi kecamatan di urutan kedua yang memiliki jumlah penduduk terbanyak setelah Kecamatan Menganti dengan jumlah penduduk sebesar 117.967 jiwa, yaitu 59.552 jiwa untuk penduduk laki-laki dan perempuan sebanyak 58.415 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan selisih penduduk antara Kecamatan Menganti dan Manyar adalah 9.915 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak selanjutnya adalah Kecamatan Kebomas dengan jumlah penduduk sebesar 111.779 jiwa. Penduduk laki-laki di Kecamatan Kebomas adalah 56.065 jiwa dan 55.714 untuk jiwa perempuan. Kemudian, kecamatan yang berada di urutan terendah adalah Kecamatan Tambak dengan jumlah penduduk hanya sebesar 31.471 jiwa. Selisih jumlah penduduk Kecamatan Menganti sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan Kecamatan Tambak dengan jumlah penduduk terendah terpaut jauh sekitar 96.411 jiwa.

#### **b. Kepadatan penduduk**

Kepadatan penduduk merupakan jumlah penduduk yang bertempat tinggal dan menetap di suatu wilayah. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Hasil penghitungan kepadatan penduduk Kabupaten Gresik diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah kecamatan. Di bawah ini disajikan tabel kepadatan penduduk di Kabupaten Gresik:

Tabel 2. 3 Kepadatan Penduduk di Setiap Kecamatan Kabupaten Gresik

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk
Wringinanom	74.178	62,62	1.185
Driyorejo	104.820	51,30	2.043
Kedamean	64.984	65,96	985
Menganti	127.882	68,71	1.861
Cerme	82.034	71,73	1.114
Benjeng	67.102	61,26	1.095
Balongpanggung	58.166	63,88	911
Duduksampeyan	50.748	74,29	683
Kebomas	111.779	30,06	3.719
Gresik	81.494	5,54	14.710
Manyar	117.967	95,42	1.236
Bungah	69.280	79,49	872
Sidayu	44.241	47,13	939
Dukun	67.483	59,03	1.143
Panceng	53.305	62,59	852
Ujungpangkah	52.771	94,82	557
Sangkapura	55.190	118,72	465
Tambak	31.471	78,70	400
<b>Jumlah</b>	<b>1.314.895</b>	<b>1191,25</b>	<b>34.770</b>

Sumber: Kabupaten Gresik dalam Angka 2022

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Gresik, yaitu 14.710 jiwa/km<sup>2</sup>. Di urutan kedua adalah Kecamatan Kebomas dengan jumlah kepadatan penduduk 3.719 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah tersebut menunjukkan selisih kepadatan penduduk antara Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas adalah 10.991 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi selanjutnya

adalah Kecamatan Menganti dengan jumlah 1.861 jiwa/km<sup>2</sup>. Kemudian, kecamatan yang berada di urutan paling bawah dengan artian memiliki jumlah kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tambak yang hanya sebesar 400 jiwa/km<sup>2</sup>. Selisih jumlah kepadatan penduduk Kecamatan Gresik sebagai kecamatan dengan jumlah kepadatan penduduk terbanyak dan Kecamatan Tambak dengan jumlah kepadatan penduduk terendah terpaut sekitar 14.310 jiwa/km<sup>2</sup>.

### 2.1.3 Kondisi Ekonomi

Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi unggulan di bidang industri, pariwisata, dan pertanian. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Kabupaten Gresik yang menjadi salah satu daerah penyangga Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Kabupaten Gresik masuk kedalam bagian kategori Pusat Kegiatan Nasional sehingga memiliki potensi besar untuk berkembang pesat. Perkembangan tersebut pasti juga mampu mendorong pertumbuhan dalam bidang ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik ditentukan berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto. Dengan demikian, pertambahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi menjadi faktor utama dalam dinamika perekonomian. Di bawah ini disajikan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gresik.

Tabel 2. 4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gresik (Miliar Rupiah), 2019-2021

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	10.285,30	10.337,08	10.160,48
2.	Pertambangan dan penggalian	10.584,41	8.000,41	9.814,14
3.	Industri pengolahan	66.603,47	66.583,60	72.264,74
4.	Pengadaan listrik dan gas	709,65	682,84	683,07



5.	Pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	85,45	88,80	98,56
6.	Konstruksi	13.484,20	12.642,99	12.903,96
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	18.294,82	16.742,78	18.260,50
8.	Transportasi dan pergudangan	3.509,13	3.334,17	3.431,93
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.947,23	1.785,41	1.958,41
10.	Informasi dan komunikasi	5.507,90	6.021,50	6.470,87
11.	Jasa keuangan dan asuransi	1.621,61	1.612,73	1.675,36
12.	Real estat	1.832,87	1.874,36	2.015,92
13.	Jasa perusahaan	415,30	430,90	446,03
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial	1.817,32	1.893,90	1.896,02
15.	Jasa pendidikan	1.219,47	1.266,38	1.305,95
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	548,12	602,43	646,79
17.	Jasa lainnya	427,35	368,27	402,54

Sumber: Kabupaten Gresik dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 industri pengolahan merupakan lapangan usaha dengan PDRB tertinggi di Kabupaten Gresik, yaitu sebesar 72.264,74 miliar rupiah. Di urutan kedua adalah perdagangan besar dan eceran (reparasi mobil dan sepeda motor) dengan jumlah PDRB 18.260,50 miliar rupiah. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa antara industri pengolahan dengan perdagangan besar dan eceran memiliki selisih yang cukup signifikan, yakni

mencapai 54.004,24 miliar rupiah. Lapangan usaha dengan PDRB tertinggi selanjutnya adalah jasa konstruksi, pada tahun 2019 PDRB yang dihasilkan sebesar 13.484,20 miliar rupiah namun, di tahun berikutnya mengalami penurunan di angka 12.642,99 miliar rupiah. Hal ini karena adanya pandemi Covid-19 sehingga aktivitas produksi baik barang maupun jasa harus dibatasi guna mempersempit penyebaran virus tersebut. Meskipun demikian, pada tahun 2021 jasa konstruksi berhasil melakukan pemulihan dengan bukti kembali naiknya PDRB dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 260.97 miliar rupiah sehingga PDRB yang didapatkan adalah 12.903,96 miliar rupiah. Kemudian, lapangan usaha yang berada di urutan paling bawah dengan artian memiliki jumlah PDRB terendah adalah pengadaan air (pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang) yang hanya sebesar 98,56 miliar rupiah.

## **2.2 Profil Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik**

### **2.2.1 Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik memiliki visi misi dalam menjalankan roda pemerintahan terutama untuk memperjelas fungsi dan tugas pokok dari instansi sehingga mampu menjalankan tujuan organisasi yang telah direncanakan secara optimal. Adapun visi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik sebagai berikut:

**“Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum yang mantap dan berkesinambungan”**

Kemudian, sebagai penjabaran dari visi yang telah dibuat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik maka ditetapkan misi untuk menunjang terwujudnya visi tersebut sebagai berikut:

1. Memantapkan manajemen pengelolaan pembangunan bidang pekerjaan umum.

2. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum secara profesional.
3. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dalam bidang layanan pekerjaan umum.

### **2.2.2 Rencana Strategis**

Rencana ini disusun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni di Kabupaten Gresik terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Rencana strategis yang dibuat juga berupaya untuk mendorong meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman yang layak agar tercipta suasana lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Berikut rencana strategis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, antara lain:

- a. Revitalisasi kawasan kumuh melalui perbaikan lingkungan permukiman.
- b. Pemulihan kawasan perumahan yang rusak akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya.
- c. Pengembangan kawasan dan lingkungan siap bangun.
- d. Pendampingan untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- e. Memfasilitasi bantuan baik berupa teknis dan pembiayaan perbaikan rumah keluarga miskin yang tidak layak huni.
- f. Memfasilitasi bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh di Kabupaten Gresik.
- g. Memfasilitasi dan melakukan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat Kabupaten Gresik.
- h. Memfasilitasi kerja sama dengan pihak pengembang dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dengan harga yang terjangkau namun, tetap mengedepankan kelayakan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan.

### 2.2.3 Tujuan-Tujuan Organisasi

- a. Mengupayakan terwujudnya peningkatan dari segi kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai penunjang kinerja pembangunan di bidang perumahan dan permukiman rakyat Kabupaten Gresik.
- b. Mengupayakan terwujudnya permukiman yang terpadu dan berkelanjutan dengan menyediakan rumah umum dan swadaya yang terjangkau dan layak huni dalam lingkungan yang sehat, nyaman, dan teratur.
- c. Mengupayakan terwujudnya sarana dan utilitas umum yang baik sebagai pendukung terciptanya lingkungan hunian yang layak untuk mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.
- d. Mengupayakan terwujudnya pengembangan dan penataan wilayah yang terpadu serta penyebaran penduduk secara proporsional dengan mengedepankan tata ruang dan daya dukung lingkungan.

### 2.2.4 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah tercantum dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik memiliki sumber daya organisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Jumlah Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

No.	Uraian Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	15

4.	JFU (jabatan fungsional umum)	39
5.	Non PNS	82
Total Keseluruhan		140

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

Berdasarkan tabel yang telah disajikan di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik terdiri dari seorang pegawai yang berada di posisi Eselon II. Kemudian, Eselon III diduduki oleh 3 orang pegawai. Terdapat 15 orang pegawai yang berada di Eselon IV. Jabatan Fungsional Umum yang kemudian disingkat JFU diduduki oleh 39 orang pegawai. Selanjutnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik masih memiliki 82 orang pegawai Non PNS (Pegawai Negeri Sipil). Adapun total keseluruhan dari pegawai adalah 140 orang.

Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pendidikan dan Pangkat/Golongan

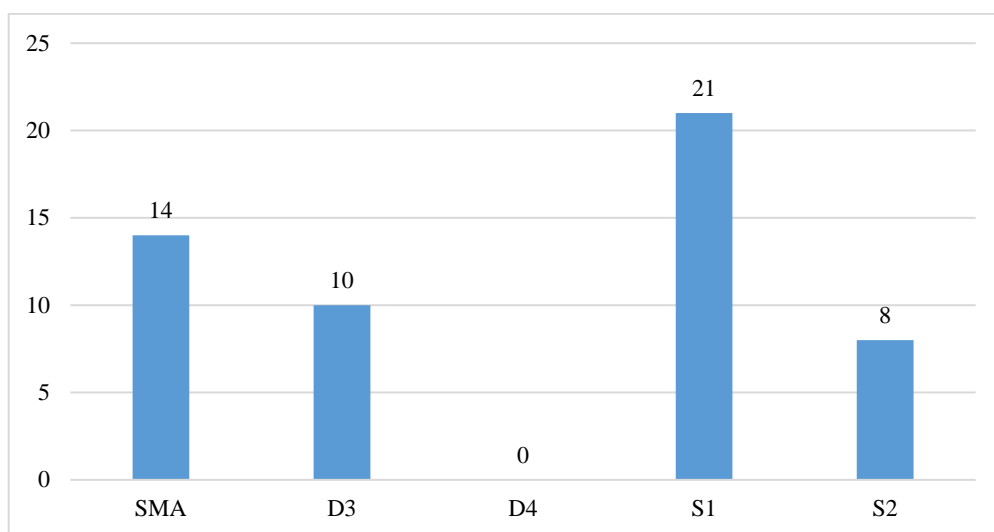
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

No.	Uraian Pangkat/Golongan	Pendidikan					Jumlah
		SMA	D3	D4	S1	S2	
1.	Pengatur Muda Tingkat I (II b)	3	-	-	-	-	3
2.	Pengatur (II c)	1	7	-	-	-	8
3.	Pengatur Tingkat I (II d)	8	-	-	-	-	8
4.	Penata Muda (III a)	1	1	-	9	-	11
5.	Penata Muda Tingkat I (III b)	1	2	-	1	-	4
6.	Penata (III c)	-	-	-	7	-	7
7.	Penata Tingkat I (III d)	-	-	-	4	-	4

8.	Pembina (IV a)	-	-	-	-	6	6
9.	Pembina Tingkat I (IV b)	-	-	-	-	2	2
	<b>Jumlah</b>	14	10	-	21	8	53

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

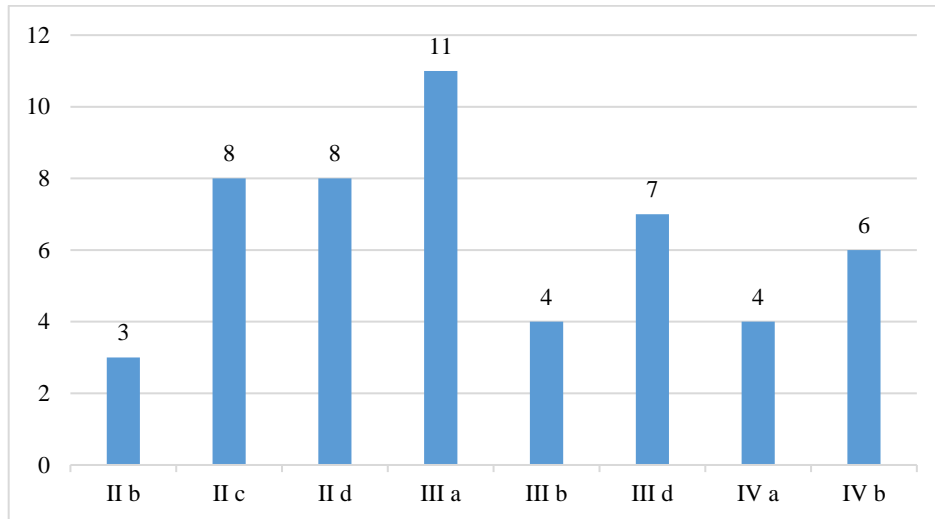
Diagram 2. 1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

Grafik di atas menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh. Adapun jenjang pendidikan yang paling banyak ditempuh adalah S1 dengan jumlah pegawai sebanyak 21 orang. Disusul oleh jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 14 orang. Kemudian, terdapat 10 orang dengan jenjang pendidikan D3 (Diploma tiga). Selanjutnya, pegawai dengan jenjang pendidikan S2 adalah 8 orang.

Diagram 2. 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

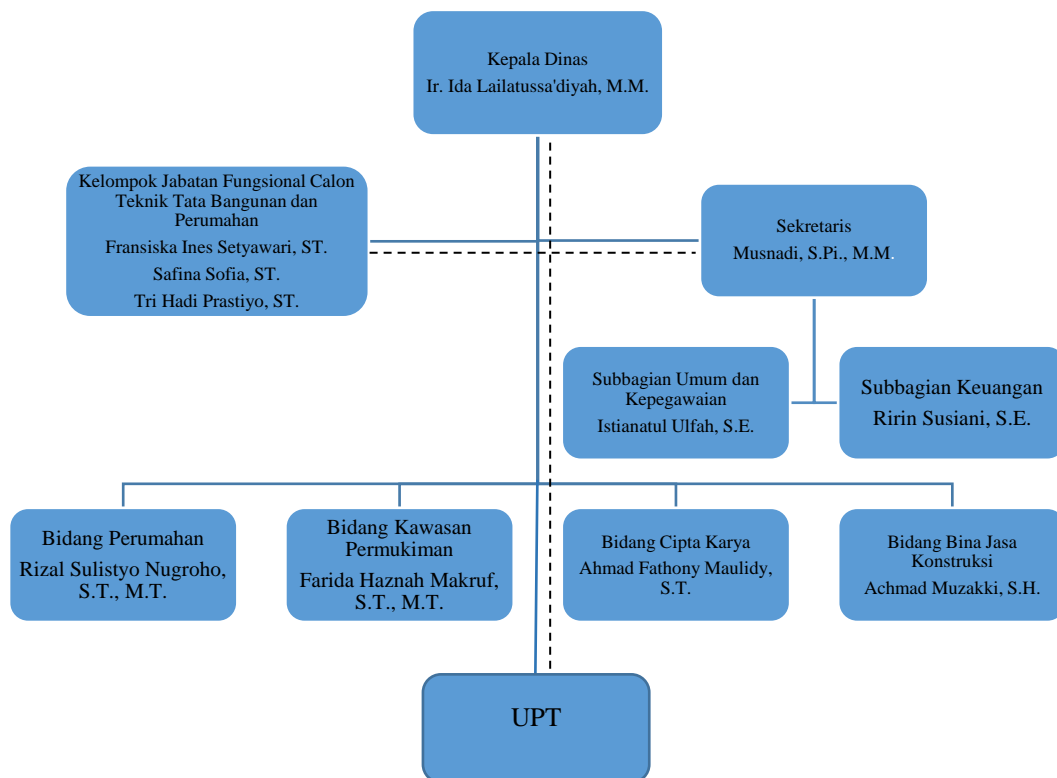


Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

Berdasarkan data grafik di atas, dapat dilihat jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik berdasarkan pangkat/golongan yang dimiliki. Adapun golongan dengan jumlah pegawai terbanyak adalah IIIa yaitu sebanyak 11 orang. Kemudian, disusul oleh 2 golongan yang memiliki jumlah pegawai sama yakni IIc dan IId yang masing-masing berjumlah 8 orang. Terdapat 7 orang dengan golongan III d. Selanjutnya, 6 orang untuk golongan IVb, masing-masing 4 orang untuk golongan IIIb dan IVa, dan yang terakhir 3 orang di golongan IIb.

### 2.2.5 Struktur Organisasi

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

### 2.2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

Kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tercantum dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Pasal 6D dalam peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa “Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan



pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A”. Selanjutnya, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. Bidang kawasan permukiman dan perumahan dideskripsikan lebih dalam mengenai tugas pokok dan fungsinya. Beberapa bidang tersebut bertanggung jawab atas penelitian yang diambil penulis, yaitu mengenai program perbaikan rumah tidak layak huni dan dikemas dalam Sigap-RTLH.

Bidang kawasan permukiman dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas untuk membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian urusan perumahan dan kawasan permukiman khususnya di bidang kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang kawasan permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di Bidang Kawasan Permukiman;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di Bidang Kawasan Permukiman;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di Bidang Kawasan Permukiman;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di Bidang Kawasan Permukiman;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di Bidang Kawasan Permukiman; dan

- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Rencana strategis yang ditangani langsung oleh bidang ini adalah mewujudkan kawasan permukiman yang berkelanjutan dengan menyediakan rumah umum dan swadaya yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Gresik. Terdapat 2 dasar indikator kinerja yang harus dipenuhi, yaitu penurunan rumah tidak layak huni dan pertumbuhan kapasitas rumah umum. Dasar indikator kinerja yang ditentukan berguna untuk mengukur tingkat pencapaian rencana strategis. Indikator kinerja tersebut sebagai patokan yang harus terealisasikan agar rencana strategis dapat tercapai. Adapun beberapa faktor dukungan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Peran serta masyarakat dalam membantu pelaksanaan program bantuan perumahan swadaya.
- b. Pelaksanaan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam mengimplementasikan program bantuan perumahan swadaya.
- c. Adanya koordinasi intensif yang dilakukan dengan *stakeholder* terkait sebagai salah satu langkah mempermudah pelaksanaan.
- d. Adanya pemantauan dan pengendalian bangunan secara berkala.
- e. Kesigapan dinas tentunya bidang kawasan permukiman dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi.
- f. Tersedianya data RTLH yang valid dan terkini sehingga mampu mempermudah dinas untuk menemukan calon penerima bantuan agar tepat sasaran.
- g. Tersedianya program pendataan RTLH sehingga dapat membantu dalam perencanaan pengusulan RTLH.
- h. Adanya Sigap-RTLH yang dikembangkan agar proses pendataan RTLH dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

- i. Tersedianya fasilitas pembinaan bagi dinas tentang perumahan secara berkala melalui *focus group discussion* antara asosiasi pengembang dengan organisasi perangkat daerah terkait, seperti: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, PLN, PDAM, dan lain-lain.

Selanjutnya, bidang perumahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas untuk membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian urusan perumahan dan kawasan permukiman khususnya di bidang perumahan. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perumahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang Perumahan, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang Perumahan, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang Perumahan, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang Perumahan, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
- e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang Perumahan, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi di bidang Perumahan;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang Perumahan, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan; dan

- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang ini dibutuhkan untuk mendukung berjalannya program dari bidang kawasan permukiman, yaitu menyediakan rumah umum dan swadaya yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut tidak hanya fokus terhadap keselamatan bangunan namun, syarat kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi penghuni juga harus terpenuhi. Oleh karenanya, bidang perumahan ditugaskan untuk memenuhi prasarana, sarana, dan utilitas agar tercipta lingkungan hunian yang baik. Hal ini sesuai dengan rencana strategis yang ditangani langsung oleh bidang perumahan, yaitu mewujudkan sarana, prasarana, dan utilitas umum yang memadai dalam mendukung terciptanya lingkungan hunian yang kondusif di Kabupaten Gresik dengan dasar indikator kinerja adanya ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas dalam kondisi baik. Rencana strategis yang kedua adalah meningkatkan kualitas pengelolaan dan pembangunan di kawasan kumuh dengan indikator kinerja penurunan kawasan kumuh. Adapun beberapa faktor dukungan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan indikator kinerja pada rencana strategis yang pertama sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan petunjuk dan prosedur yang digunakan dalam mewujudkan pengadaan sarana, prasarana, dan utilitas umum.
- b. Melakukan pendataan yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan.
- c. Adanya peningkatan koordinasi dengan pihak terkait untuk proses pengadaan sarana, prasarana, dan utilitas umum.
- d. Adanya pemantauan dan pengendalian secara berkala.

Kemudian, di bawah ini disebutkan juga beberapa faktor dukungan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan indikator kinerja pada rencana strategis yang kedua sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mengentas permasalahan kawasan kumuh.
- b. Pelaksanaan kerja sama dengan beberapa OPD untuk mencapai sasaran strategis, yaitu Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran, dan kecamatan.
- c. Peran serta masyarakat dalam membantu pelaksanaan penanganan kawasan kumuh.
- d. Adanya partisipasi dari perusahaan BUMN dan swasta dengan bentuk bantuan CSR kepada masyarakat untuk membantu penanganan kawasan kumuh.